Volume 8 Nomor 2, Juni 2006 ISSN 1410-9204

EKONOMI DAN BISNIS E&B

Berkala Publikasi Gagasan Konseptual, Hasil Penelitian, Kajian, dan Terapan Teori

Larry Hinaloc — Fisheries Resource Management Project Implementation in the Municipality of Butuan and Nasipit, the Philippines

I Ketut Nama — Foreign Debt and The Macroeconomics of Savings Gap

Bernadetta Dwi Suatmi — Peranan Pinjaman Luar Negeri Indonesia Dan Implikasinya Terhadap Neraca Pembayaran 1998-2005

A. Hery Pratono — Poverty Agglomeration in Indonesia

Gendut Sukarno — *Mass Customization* dalam Membentuk Kepuasan Pelanggan: Studi Kasus Mie Instan

Surat Keputusan Akreditasi Dirjen Dikti Depdiknas No 26/DIKTI/Kep/2005 Tanggal 30 Mei 2005
Penerbit: Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Surabaya

Ekon.Bisnis | Vol. 8 | No. 2 | Halaman 83-168 | Surabaya, Juni 2006 | ISSN 1410-9204

ISSN 1410 - 9204

EKONOMI DAN BISNIS

Surat Keputusan Akreditasi Dirjen Dikti Nomor 02/Dikti/Kep/2002
Tanggal 7 Januari 2002

Diterbitkan oleh **Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Surabaya**, Jalan Raya Kalirungkut Surabaya 60293.

Kebijakan Penyuntingan: Berkala **EKONOMI dan BISNIS** diterbitkan sebagai media publikasi gagasan konseptual, hasil penelitian, kajian, dan terapan teori. Artikel yang dimuat merupakan pendapat pribadi penulisnya, bukan mencerminkan pendapat penyunting atau pun penerbit.

Ketua Penyunting :
A. Hery Pratono

Wakil Ketua:
Soedarjanto

Penyunting Pelaksana:
Firman Rosjadi, Suyanto, Bambang Budiarto, Jondar

Mitra Bestari:

Soetrisno (Universitas Surabaya)
H. Harijono (Universitas Jember)
Surya Dharma (Universitas Indonesia)
Jogindar S. Uppal (State University of New York at Albany)
Chris Manning (Australia National University)
Elisa Muresan (Long Island University)
Henrycus Winarto (Universitas Surabaya)
Edy Yuwono Slamet (Universitas Airlangga)
Yohanes Eko Riyanto (National University of Singapore)
Candra Fajri Ananda (Universitas Brawijaya)

Informasi Publikasi: *EKONOMI dan BISNIS* (ISSN 1410 - 9204) diterbitkan secara berkala dua kali dalam satu tahun pada pertengahan Juni dan Desember. Terbit kali pertama pada Desember 1998.

Informasi Tata Usaha: surat menyurat dapat dikirimkan ke redaksi **EKONOMI DAN BISNIS** Komplek Fakultas Ekonomi Universitas Surabaya, Jl Raya Kalirungkut Surabaya 60293, Telp. (031) 2981137 atau 2981199. Faximile (031) 2981131. Homepage: *economics.ubaya.ac.id*, e-mail: hery_pra@ubaya.ac.id.

Langganan untuk wilayah Indonesia sebesar Rp25.000,- per eksemplar. Pembayaran dapat dilakukan dengan cara: (1) langsung ke alamat tata usaha, atau (2) transfer ke rekening Fak Ekonomi Ubaya Bank Central Asia KCU Darmo Surabaya No 088 383 4655.

Penerimaan Tulisan (artikel): Penyunting mengundang berbagai kalangan untuk menulis di jurnal ini, untuk tulisan yang belum pernah diterbitkan dalam media cetak lain. Naskah yang diterima dievaluasi oleh mitra bestari, dan dapat diubah untuk menyeragamkan format, tanpa mengubah isinya.

Volume 8 Nomor 2, Juni 2006 ISSN 1410 - 9204

EKONOMI DAN BISNIS

Berkala Publikasi Gagasan Konseptual, Hasil Penelitian, Kajian, dan Terapan Teori

E&B

Larry Hinaloc: Fisheries Resource Management Project Implementation in the Municipality of Butuan and Nasipit, the Philippines 83 -106

I Ketut Nama: Foreign Debt and The Macroeconomics of Savings Gap 107 - 124

Bernadetta Dwi Suatmi: Peranan Pinjaman Luar Negeri Indonesia dan Implikasinya Terhadap Neraca Pembayaran 1998 - 2005 125- 144

A. Hery Pratono: Poverty Agglomeration in Indonesia 145-154

Gendut Sukarno: "Mass Customisation" Dalam Membentuk Kepuasan Pelanggan 155-168

Surat Keputusan Akreditasi Dirjen Dikti Depdiknas No 26/DIKTI/Kep/2005 Tanggal 30 Mei 2005

Penerbit: Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Surabaya

Ekon. Bisnis	Vol. 8	No. 2	Halaman 83 - 168	Surabaya, Juni 2006	ISSN 1410-9204

E&B

EKONOMI
dan BISNIS

PERANAN PINJAMAN LUAR NEGERI INDONESIA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP NERACA PEMBAYARAN 1998 - 2005

Bernadetta Dwi Suatmi

ABSTRACT

This paper describes the role of Indonesia's external debt and its impact on the balance of payment in the after Asian financial crisis (1998 - 2005). In this period, the total external debt had the decreasing tendency. The decrease of total external debt was due to the decrease of private external debt. The government external debt in U.S. dollar terms had the increasing tendency because of the increase of commercial loan and the strengthening of Japanese yen, and to lesser extent, other currencies, against the U.S. dollar. During 1998 - 2005 the debt service ratio (DSR) and ratio of total external debt to exports of goods and services of Indonesia were relatively high compared to the other Asia's developing countries.

Kata-kata kunci: Pinjaman Luar Negeri, Neraca Pembayaran, Debt Service Ratio

Bernadetta Dwi Suatmi
Research Associate
Lembaga Penelitian Ekonomi
Institut Bisnis dan Informatika Indonesia (LPE IBII), Jakarta
Email: atmi76@yahoo.com

Sebagian dari artikel ini merupakan Supporting Paper yang akan dipresentasikan pada Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia XVI, di Manado, 18 - 20 Juni 2006

Di setiap negara, kebutuhan pinjaman luar negeri sebagai alternatif sumber pembiayaan pembangunan selalu menimbulkan perdebatan panjang. Mereka yang mendukung perlunya pinjaman luar negeri dalam perekonomian pada umumnya berargumen bahwa pinjaman luar negeri diperlukan untuk menutup kesenjangan sumber pembiayaan (saving investment gap) dan menutup kesenjangan ekspor impor *(foreign exchange gap)*. Di lain pihak, mereka yang menentang kehadiran pinjaman luar negeri pada umumnya berargumen bahwa pinjaman luar negeri akan menimbulkan ketergantungan terhadap luar negeri. Hal ini terutama karena pinjaman luar negeri biasanya disertai dengan syarat-syarat tertentu dari negara kreditor yang sifatnya mengikat debitor.

Terlepas dari pro dan kontra tersebut, Indonesia - sama dengan hampir semua negara yang lain - juga melakukan pinjaman -baik pinjaman dalam negeri maupun pinjaman luar negeri - sebagai pelengkap penerimaan perpajakan untuk membiayai pembangunan. Sejak jaman Orde Baru kebijakan untuk melakukan pinjaman luar negeri adalah hal yang lazim. Kebijakan ini tetap dilakukan oleh pemerintah bahkan sampai saat ini.

Artikel ini akan membahas pinjaman Indonesia periode setelah krisis. Jika dilihat secara menyeluruh, seperti terlihat pada Lampiran 1, dari periode 1998 sampai dengan 2005 total pinjaman luar negeri Indonesia - pemerintah dan swasta- mencapai puncaknya pada tahun 1998 sebesar 150,9 miliar US dollar yang terdiri atas pinjaman luar negeri pemerintah dan swasta masing-masing 67,3 miliar US $ dan 83,6 miliar US $.Total pinjaman luar negeri ini cenderung menurun dari tahun ke tahun hingga pada 2005 menjadi 133,5 miliar US $ yang terdiri atas pinjaman pemerintah dan swasta masing-masing 79,6 miliar US $ dan 53,9 miliar US $. Penurunan total pinjaman luar negeri ini terutama berasal dari penurunan pinjaman luar negeri swasta sementara pinjaman pemerintah pada periode ini cenderung meningkat.

KERANGKA TEORITIS

Hubungan antara pinjaman - baik pinjaman dalam negeri maupun luar negeri - dengan makro ekonomi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabungan swasta (Sp) adalah bagian dari tabungan siap dibelanjakan yang tidak dikonsumsi:

(1) $Sp = Y - T - C$

Tabungan pemerintah adalah bagian dari pendapatan pemerintah (misalnya dari pajak) yang tidak digunakan untuk konsumsi. Konsumsi pemerintah, dalam pendapatan nasional adalah pengeluaran pemerintah (G). Dengan demikian, tabungan pemerintah adalah sebagai berikut:

(2) $Sg = T - G$

Tabungan nasional terdiri atas dua komponen yaitu tabungan swasta dan tabungan pemerintah:

(3) $S = Y - C - G = (Y - T - C) + (T - G)$

Pendapatan nasional dalam perekonomian terbuka adalah $Y = C + I + G + X - M$. Tabungan nasional adalah $Y - C - G$, sementara itu transaksi berjalan (CA) adalah selisih ekspor (X) minus impor (M).

Identitas pendapatan nasional dapat dinyatakan juga sebagai berikut:

(4) $S = I + CA$

Definisi tabungan swasta dan tabungan pemerintah dapat digunakan untuk menganalisis keseimbangan anggaran terhadap keseimbangan transaksi berjalan, sebagai berikut:

(5) $Sp = I + CA - Sg = I + CA - (T-G) = I + CA + (G-T)$

di mana (G-T) adalah anggaran pemerintah , jika selisih G-T adalah negatif berarti adalah defisit dan surplus anggaran jika selisihnya positif.

Persamaan di atas dapat ditulis kembali sebagai berikut:

(6) $CA = Sp - I - (G-T)$

Dari persamaan di atas terlihat bahwa defisit neraca transaksi berjalan *(trade gap)* terjadi karena kesenjangan antara tabungan dengan investasi, di mana tabungan lebih kecil daripada investasi (I - Sp = *Resources Gap/Saving Investment Gap*) dan adanya defisit anggaran pemerintah (G-T = *Fiscal Gap*). Fenomena ini disebut sebagai *three gaps model* (Anaruo dan Ramchander,1998; Kearney dan Monadjemi,1990; Leachman dan Francis, 2002).

Peranan pinjaman bagi pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan dengan teori pertumbuhan ekonomi Harrod Domar (Todaro, 2000):

Tabungan (S) adalah proporsi tertentu (s) dari pendapatan nasional (Y):

$$(7)\ S = sY$$

Investasi (I) didefinisikan sebagai perubahan stok kapital, K:

$$(8)\ I = \Delta K$$

Jika stok kapital merupakan rasio terhadap pendapatan nasional:

$$(9)\ k = \frac{\Delta K}{\Delta Y}$$

atau

$$(10)\ k = \frac{K}{Y}$$

atau

$$(11)\ \Delta K = k \Delta Y$$

Jika tabungan nasional total, S , harus sama dengan I, maka

$$(12)\ S = I$$

Seperti telah diketahui, S = sY, dengan demikian

$$(13)\ I = \Delta K = k \Delta Y$$

Dengan demikian

$$(14)\ S = sY = \Delta K = k \Delta Y = I$$

Atau

$$(15)\ sY = k \Delta Y$$

Jika persamaan di atas dibagi dengan Y, kemudian dibagi lagi dengan k, maka akan didapatkan

$$(16)\ \frac{\Delta Y}{Y} = \frac{s}{k}$$

Menurut persamaan tersebut pertumbuhan ekonomi suatu negara (Y/Y) ditentukan secara bersama-sama oleh rasio tabungan nasional, s, dan national capital-output ratio, k. Tingkat pertumbuhan ekonomi secara langsung berhubungan positif dengan rasio tabungan dan berhubungan negatif dengan *capital output ratio.* Dengan demikian semakin tinggi tabungan dan investasi semakin tinggi pula tingkat pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi *capital output ratio,* k, semakin rendah pertumbuhan ekonomi yang dicapai. Berkaitan dengan teori ini, bagi negara berkembang, kendala utama dalam pembangunan adalah rendahnya tingkat pembentukan kapital. Kebanyakan negara berkembang mengalami kesenjangan tabungan *(savings gap)*, artinya tabungan nasional tidak cukup

untuk membiayai investasi. Jika hal ini terjadi, maka yang biasanya terjadi negara-negara tersebut akan menutup kesenjangan tabungan dengan meminjam dari luar negeri *(foreign aid)* atau dengan mengijinkan investasi asing *(foreign investment)* di negaranya (Edwards, 1995; Fry, 1996; Ibrahim dan Kumah, 1996).

PINJAMAN LUAR NEGERI PEMERINTAH

Pinjaman luar negeri pemerintah adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan atau devisa yang dirupiahkan maupun dalam bentuk barang dan atau dalam bentuk jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Kategori pinjaman luar negeri pemerintah menurut persyaratan dibagi menjadi dua jenis pinjaman yaitu pinjaman komersial dan pinjaman bukan komersial

Pinjaman komersial yaitu pinjaman pemerintah yang diperoleh dari sektor swasta luar negeri dengan suku bunga pasar seperti surat berharga atau obligasi. Sementara itu pinjaman bukan komersial dikelompokkan lagi menjadi pinjaman ODA *(Official Development Assistance)* dan pinjaman non-ODA. Pinjaman ODA yaitu pinjaman dengan syarat lunak seperti pinjaman pemerintah kepada pemerintah (bilateral) atau lembaga-lembaga multilateral kepada pemeritah. Pinjaman non-ODA atau setengah lunak adalah pinjaman dalam bentuk fasilitas kredit ekspor dan leasing.

Dari Lampiran 1 terlihat pada 1998 posisi pinjaman luar negeri pemerintah 67,3 miliar US dollar yang terdiri atas pinjaman komersial, pinjaman ODA dan non-ODA yang pada periode ini masing-masing jumlahnya 2,4 miliar US dollar , 48,4 miliar US dollar dan 26,0 miliar US dollar. Sampai dengan 2005 posisi pinjaman luar negeri pemerintah 79,6 miliar US dollar yang terdiri atas pinjaman komersial, pinjaman ODA dan non-ODA masing-masing jumlahnya 9,5 miliar US dollar, 53,9 miliar US dollar dan 16,0 miliar US dollar. Dengan demikian dari 1998 sampai dengan 2005 total pinjaman luar negeri pemerintah mengalami peningkatan sebesar 12,2 miliar dengan perincian peningkatan pada pinjaman komersial dan pinjaman ODA masing-masing 7,2 miliar US dollar , dan 5,6 miliar US $, sementara itu pinjaman non-ODA menurun 481 juta US $. Kecenderungan peningkatan pinjaman komersial beberapa tahun terakhir ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Keunggulan dari pinjaman komersial adalah persyaratannya lebih lunak dan berbentuk tunai sehingga bisa langsung digunakan namun

kelemahannya adalah tingkat bunganya lebih tinggi dibanding tingkat bunga pinjaman bukan komersial (ODA dan non-ODA).

Dari lampiran ini juga terlihat bahwa pinjaman bilateral pemerintah lebih besar dibandingkan pinjaman multilateral. Dalam pinjaman bilateral terlihat bahwa Jepang adalah negara yang memberikan pinjaman terbesar kepada Indonesia, selanjutnya berturut-turut dalam lima besar pemberi pinjaman terbesar adalah Amerika Serikat, Perancis, Jerman, Australia, dan Belanda. Sampai dengan 2005 pinjaman bilateral pemerintah Indonesia 27,5 miliar US dollar. Dari 27,5 miliar US dollar ini 19,9 miliar diantaranya berasal dari pemerintah Jepang. Khusus untuk pinjaman dari Jepang, Jepang tidak hanya memberikan pinjaman ke Indonesia melalui pinjaman bilateral. Jepang juga memberikan pinjaman kepada Indonesia melalui pinjaman multilateral, diantaranya pinjaman yang diberikan melalui JBIC (Japan Bank for International Cooperation). Total pinjaman pemerintah Jepang, seperti terlihat dalam Lampiran 2, adalah 24,7 miliar US dollar. Jika 19,9 miliar US dollar diantaranya merupakan pinjaman bilateral, maka sisanya yaitu 4,8 miliar US $ adalah pinjaman pemerintah Jepang yang diberikan melalui skema pinjaman multilateral. Penurunan pinjaman bilateral relatif lambat karena Indonesia memperoleh fasilitas penjadwalan kembali melalui Paris Club dan London Club.

Untuk pinjaman multilateral, posisi pada 1998 26,0 miliar US dollar dan pada 2005 pinjaman ini berada pada posisi 26,5 miliar US dollar. Selama rentang waktu 1998 sampai dengan 2005 posisi pinjaman ini relatif stagnan. Pinjaman multilateral ini diantaranya adalah pinjaman yang diperoleh Indonesia dari IMF (International Monetary Fund). Pada 1998 posisi pinjaman Indonesia dari IMF 9,1 miliar US dollar. Pinjaman dari IMF ini mencapai puncaknya pada akhir tahun 2000 di mana posisinya pada tahun tersebut adalah 10,9 miliar US dollar. Sampai dengan 2005 posisi pinjaman Indonesia ke IMF masih sebesar 7,8 miliar US dollar.

Jika pinjaman dari IMF dikeluarkan, maka posisi total pinjaman luar negeri pemerintah non-IMF pada 1998, seperti terlihat pada Lampiran 1 sebesar 58,2 miliar US dollar. Sementara itu pada 2005 berada pada posisi 71,8 miliar. Angka ini menunjukkan kecenderungan peningkatan pinjaman luar negeri pemerintah Indonesia. Pinjaman yang berasal dari IMF tidak diperhitungkan sebagai beban pemerintah karena tidak memiliki pengaruh ke APBN (Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara). Pinjaman dari IMF ini sifatnya menambah cadangan devisa dan tidak boleh dipergunakan oleh Indonesia kecuali jika terjadi krisis neraca pembayaran.

Jika dilihat dari perkembangan pembayaran pokok dan bunga pinjaman luar negeri pemerintah, seperti tampak pada Lampiran 3, selama 1999 sampai dengan 2005, total pembayaran pokok dan bunga yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah 48,3 miliar US dollar, yang terdiri atas pembayaran cicilan pokok sebesar 28,6 miliar US dollar dan bunga 19,6 miliar US dollar.

Sementara itu, jika dilihat perkembangan penarikan dan pembayaran pinjaman luar negeri Indonesia seperti tampak pada Lampiran 4, selama periode 1999 sampai dengan 2005 penarikan pinjaman pemerintah Indonesia di luar pinjaman dari IMF 22,2 miliar US $. Pada periode ini pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia di luar pinjaman IMF 18,3 miliar US $. Pemerintah juga mendapatkan penjadwalan kembali atas pinjaman luar negeri yang terdiri atas penjadwalan kembali cicilan pokok dan bunga sebesar 16,2 miliar US dollar dengan perincian penjadwalan kembali atas cicilan pokok dan bunga masing-masing 14,2 miliar US dollar dan 2,1 miliar US $.

Selama periode ini terlihat nilai penarikan pinjaman cenderung menurun dari tahun ke tahun. Jika pada tahun 1998 nilai penarikan pinjaman pemerintah masih 5,9 miliar US $ maka pada tahun 2005 nilainya turun menjadi 2,6 milyar US $. Kecenderungan menurunnya penarikan pinjaman pemerintah ini di antaranya menunjukkan adanya komitmen pemerintah untuk mengurangi ketergantungannya terhadap pinjaman luar negeri. Di samping itu dimungkinkan penyebab lainnya adalah semakin beratnya syarat-syarat yang diajukan kreditur kepada Indonesia dan makin terbatasnya dana pendamping yang tersedia di dalam negeri.

Sejak 2003 nilai penarikan pinjaman luar negeri pemerintah lebih kecil dibandingkan pembayaran cicilan pokoknya. Padahal nilai pembayaran cicilan pokok tersebut sudah dijadwal ulang *(rescheduling)*. Tanpa ada program penjadwalan ulang maka jumlah pembayaran pokok pinjaman luar negeri pemerintah akan jauh lebih besar dibandingkan penarikan pinjaman baru seperti yang terlihat pada tahun 2004. Sebagai alternatif sumber dana lain selain pinjaman luar negeri terlihat mulai tahun 2004 pemerintah mulai menjual obligasi di pasar luar negeri. Pada tahun 2004 dan sampai 2005 pemerintah telah menerbitkan obligasi senilai masing-masing 920 juta US $ dan 2,1 milyar US $.

Selama periode Desember 1998 sampai dengan 2005 Indonesia telah melakukan penarikan pinjaman 12,0 miliar US dollar. Pinjaman ini didapatkan oleh pemerintah sejak krisis ekonomi 1998 sampai dengan Desember 2003 untuk menambah cadangan devisa. Sesuai dengan kesepakatan pemerintah untuk mengakhiri kerja sama dengan

IMF pada tahun 2003, maka mulai tahun 2004 Indonesia tidak mendapatkan pinjaman dari IMF. Sejak tahun 2004 kerja sama Indonesia sebatas pada *Post Program Monitoring*. Kewajiban yang timbul atas pinjaman dari IMF ini mulai tampak pada tahun 2001 dimana Indonesia harus mulai melakukan pembayaran atas pinjaman yang dilakukan kepada IMF. Dari 2001 sampai dengan 2005 Indonesia telah melakukan pembayaran 7,6 miliar US dollar.

Posisi pinjaman luar negeri suatu negara pada periode tertentu dibandingkan periode sebelumnya dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor, yaitu: (1) penarikan dana baru *(disbursement)*, (2) cicilan pokok, (3) kurs. Dengan asumsi tidak ada perubahan kurs, maka seharusnya dengan menggunakan data penarikan pinjaman baru dikurangi pembayaran cicilan pokok suatu periode tertentu akan didapatkan posisi pinjaman luar negeri pada periode tersebut. Namun, jika diperhatikan lebih jauh dengan menggunakan data yang tersedia, perhitungan dengan metode tersebut menghasilkan angka yang berbeda dengan data aktual posisi pinjaman luar negeri pemerintah. Dari Lampiran 4 terlihat bahwa selama periode 1999 sampai dengan 2005 penarikan pinjaman luar negeri pemerintah di luar IMF berjumlah 22,2 miliar US $ sementara amortisasi dan penjadwalan ulang amortisasi pada periode tersebut masing-masing 34,5 miliar US $ dan 14,2 miliar US $. Dengan demikian, pada periode tersebut utang pemerintah seharusnya bertambah 1,8 milyar US $. Dengan menggunakan data Posisi Pinjaman Luar Negeri Indonesia di luar IMF pada akhir periode 1998 yang berjumlah 58,2 miliar US $, maka seharusnya pada 2005 posisi pinjaman luar negeri Indonesia 60,0 miliar US $. Namun seperti terlihat pada Lampiran 1 Posisi Pinjaman Luar Negeri Pemerintah Indonesia pada 2005 di luar IMF 71,6 miliar US $. Dengan demikian terdapat selisih antara posisi aktual dan posisi yang seharusnya adalah 11,7 miliar US $. Perbedaan ini terjadi karena adanya fluktuasi kurs beberapa mata uang utama dalam pinjaman luar negeri pemerintah terhadap US dollar.

Pinjaman luar pemerintah Indonesia tidak hanya dalam bentuk US dollar melainkan juga dalam bentuk yen Jepang, SDR *(Special Drawing Rights)*, Euro, Poundsterling, dan mata uang lainnya. Dari lampiran ini terlihat bahwa dalam beberapa tahun sebagian besar pinjaman luar negeri pemerintah berupa yen Jepang dan berikutnya berturut-turut dalam bentuk US dollar, SDR, Euro, Poundsterling, dan mata uang lainnya. Karena pinjaman luar negeri pemerintah terdiri dari beberapa mata uang yang dinyatakan dalam US dollar, maka apresiasi atau depresiasi suatu mata uang terhadap dollar akan

berpengaruh pada jumlah yang harus dibayarkan pemerintah pada periode tertentu dan selanjutnya akan berpengaruh pada posisi jumlah pinjaman luar negeri pemerintah. Jika nilai US dollar melemah terhadap mata uang yang lain maka posisi akhir pinjaman luar negeri pemerintah akan menjadi lebih besar. Fluktuasi kurs nilai tukar beberapa mata uang utama dan SDR terhadap US dollar dapat dilihat pada Lampiran 5.

Hal sama juga dapat dilihat pada data pinjaman IMF ke Indonesia. Selama periode 1999 sampai dengan 2005 penarikan pinjaman IMF 6,3 miliar US $, sementara amortisasi pada periode tersebut 7,6 miliar US $. Dengan demikian, pada periode tersebut pinjaman pemerintah pada IMF seharusnya berkurang 1,4 miliar US $. Dengan menggunakan data Posisi Pinjaman Luar Negeri IMF untuk Indonesia 9,1 miliar US $ pada akhir periode 1998 seharusnya pada 2005 posisi pinjaman IMF adalah 7,7 miliar US $. Namun sPosisi Pinjaman Luar Negeri Indonesia pada IMF pada 2005 IMF 7,8 miliar US $. Dengan demikian terdapat selisih 0,1 milyar US $. Perbedaan ini terjadi karena adanya fluktuasi kurs SDR terhadap dollar selama periode tersebut.

PINJAMAN LUAR NEGERI SWASTA

Pinjaman luar negeri swasta adalah utang penduduk kepada bukan penduduk , dalam valuta asing dan atau rupiah berdasarkan perjanjian kredit atau perjanjian lainnya, kecuali giro, tabungan, dan deposito. Pinjaman luar negeri swasta terdiri atas pinjaman lembaga keuangan dan pinjaman bukan lembaga keuangan. Dari Lampiran 1 terlihat pada akhir 1998 posisi pinjaman swasta mencapai 83,6 miliar US dollar yang terdiri atas pinjaman lembaga keuangan 12,9 miliar dan pinjaman bukan lembaga keuangan 70,7 miliar US dollar. Pada akhir 2005, total pinjaman swasta 53,9 miliar US dollar yang terdiri dari pinjaman lembaga keuangan 6,9 miliar US $ dan pinjaman bukan lembaga keuangan 46,9 miliarUS $. Dari angka-angka tersebut terlihat bahwa dalam periode tersebut pinjaman swasta cenderung menurun.

Pinjaman luar negeri swasta lembaga keuangan dirinci lebih lanjut menjadi dua bagian yaitu pinjaman bank dan pinjaman bukan bank. Pada akhir 1998 pinjaman lembaga keuangan bank dan bukan masing-masing sebesar 10,8 miliar US $ dan 2,1 miliarUS $. Sampai dengan akhir 2005 pinjaman lembaga keuangan bank dan bukan bank masing-masing sebesar 4,8 miliar US $ dan 2,1 miliar US $. Pinjaman luar negeri swasta bank dibagi lagi menjadi lebih detil menurut kelompok bank yaitu Bank Persero dan Bank Swasta, yang terdiri atas: bank swasta nasional, bank campuran, dan bank asing. Pinjaman

luar negeri swasta, proporsi pinjaman swasta bukan bank lebih besar dibandingkan pinjaman swasta bank. Untuk pinjaman swasta bank, terlihat bahwa proporsi pinjaman bank persero paling besar dibandingkan pinjaman bank swasta nasional, bank campuran, maupun bank asing. Pinjaman swasta bukan bank selanjutnya dirinci lebih lanjut menjad pinjaman lembaga keuangan bukan bank dan pinjaman bukan lembaga keuangan

Total pinjaman swasta bukan bank proporsi pinjaman bukan lembaga keuangan lebih besar dibandingkan pinjaman lembaga keuangan. Menurut status perusahaan, pinjaman luar negeri swasta lembaga keuangan bukan bank terdiri atas BUMN (Badan Usaha Milik Negara), Swasta Nasional, dan Swasta Asing. Lampiran 6 juga menunjukkan dari total pinjaman swasta bukan bank, proporsi pinjaman swasta asing lebih besar dibanding BUMN dan swasta nasional.Pinjaman swasta asing di Indonesia dianggap pinjaman Indonesia karena investasi asing di Indonesia tidak seluruhnya dibiayai oleh investor asing, sebagian dari investasi tersebut dibiayai dari pinjaman. Dana investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment*/FDI) yang masuk ke Indonesia dari tahun 1998 sampai dengan 2005 hanya 41,8 persen yang merupakan modal sendiri, sisanya merupakan pinjaman. Jika sebagian besar FDI dibiayai oleh pinjaman maka hal ini akan berdampak pada peningkatan pinjaman luar negeri Indonesia, hanya saja yang meminjam adalah investor asing. Sejak 1998 sampai 2005 bagian terbesar pinjaman ini digunakan oleh sektor industri pengolahan dengan proporsi yang cenderung menurun dari tahun ke tahun.

NERACA PEMBAYARAN

Ada tiga indikator yang digunakan oleh Bank Dunia untuk menganalisis tingkat aman atau tidaknya pinjaman luar negeri suatu negara. Ketiga indikator tersebut adalah *Debt Service Ratio* (DSR), Rasio Total Utang Terhadap Ekspor, dan Rasio Total Utang (Luar Negeri dan Dalam Negeri) Pemerintah Pusat terhadap PDB (Alam dan Sundberg,, 2002). *Debt Service Ratio* (DSR) adalah rasio pembayaran cicilan pokok dan bunga terhadap ekspor barang dan jasa. Menurut Bank Dunia, suatu negara dikatakan dalam posisi aman pinjaman luar negerinya jika DSR nya maksimal 20 persen. Untuk rasio total pinjaman - yang merupakan penjumlahan pinjaman luar negeri pemerintah dan swasta - terhadap ekspor barang dan jasa, suatu negara dikatakan dalam batas aman jika rasio total pinjamannya terhadap ekspor diantara 130 sampai dengan 220 persen. Rasio ini digunakan untuk melihat implikasi total pinjaman luar negeri pemerintah dan

swasta terhadap kebutuhan devisa yang digunakan untuk pembayaran pinjaman. Semakin tinggi DSR, makin banyak devisa yang diperlukan untuk membayar pinjaman. Semakin banyak devisa yang diperlukan untuk membayar pinjaman makin banyak ekspor barang dan jasa yang diperlukan. Hal ini karena devisa diperoleh salah satunya dari hasil ekspor barang dan jasa.

Jika dilihat implikasi pinjaman luar negeri terhadap devisa, baik pinjaman luar negeri pemerintah maupun swasta dibayar menggunakan devisa yang diperoleh dari ekspor. Sementara itu untuk rasio total pinjaman pemerintah terhadap PDB, suatu negara dikatakan masih dalam batas aman jika rasio pinjaman pemerintah terhadap PDB antara 50 sampai dengan 80 persen. Untuk kriteria ini, pinjaman pemerintah yang dimaksud adalah penjumlahan pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam negeri. PDB digunakan sebagai ukuran karena PDB suatu negara mempengaruhi penerimaan suatu negara. Penerimaan negara ini pada gilirannya digunakan untuk pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman.

Seperti terlihat pada grafik 1, pada periode 1998 sampai dengan 2004 DSR Indonesia melebihi kriteria aman yang ditetapkan Bank Dunia. Kriteria aman menurut Bank Dunia 20 persen sementara itu Indonesia pada periode tersebut rata-rata per tahun DSR nya 42 persen. Dari grafik ini juga terlihat bahwa dalam periode ini DSR swasta lebih tinggi dibanding DSR pemerintah.

Jika dibandingkan dengan negara-negara berkembang Asia lainnya, akan terlihat bahwa DSR Indonesia relatif tinggi. Pada periode 1998 sampai dengan 2005 rata-rata DSR negara-negara berkembang Asia lainnya 14,1 persen. Untuk rasio total pinjaman terhadap ekspor, dari 1998 sampai dengan 2004 rasio total pinjaman Indonesia terhadap ekspor 234,5 persen. Angka ini jauh lebih tinggi dibanding negara-negara berkembang Asia lainnya yang 'hanya' berkisar 93,9 persen. Indikator terakhir, yaitu rasio pinjaman pemerintah pusat terhadap PDB, dari grafik 4 terlihat bahwa rasio pinjaman pemerintah terhadap PDB cenderung menurun dari tahun ke tahun, pada tahun 2000 rasionya masih di atas 90 persen. Pada tahun 2004 rasio pinjaman pemerintah terhadap PDB turun menjadi sekitar 60 persen.

Dibandingkan Thailand, salah satu negara di Asia yang juga terkena krisis, kinerja pengelolaan pinjaman luar negeri Indonesia relatif kurang menggembirakan. Dari tabel 2 terlihat bahwa total pinjaman luar negeri Indonesia mencapai puncaknya pada tahun 1998 yaitu sebesar 151,2 miliar US $. Jumlah ini berangsur-angsur turun hingga pada

Grafik 1
Debt Service Ratio Indonesia Sektor Pemerintah dan Swasta (%)

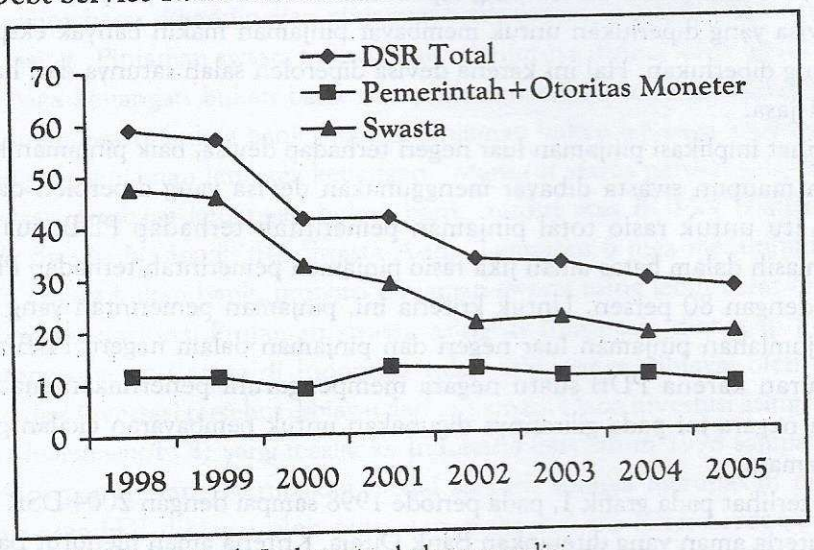

Sumber: Bank Indonesia, beberapa edisi

Grafik 1
Perbandingan Debt Service Ratio Indonesia dengan Negara Asia Lain

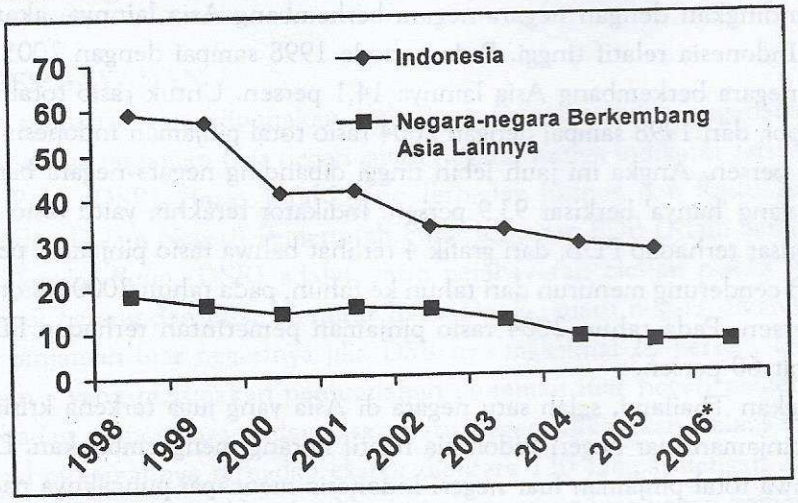

Sumber: Bank Indonesia, beberapa edisi

tahun 2004 menjadi sebesar 136 miliar US $. Dengan demikian rata-rata pinjaman luar negeri Indonesia setiap tahun berkurang 2,5 miliar US $. Sementara itu pinjaman luar negeri Thailand, seperti terlihat pada Lampiran 13,mencapai puncaknya pada tahun 1997 sebesar 109,3 miliar US $, satu tahun setelah krisis yaitu tahun 1998 pinjaman luar negeri Thailand 105,1 miliar US $ dan berangsur-angsur turun hingga pada tahun 2004 tinggal 51,3 miliar US $. Dalam periode 1998 sampai dengan 2004 rata-rata tiap tahun penurunan pinjaman luar negeri Thailand berkurang 8,9 miliar US $. Dari perbandingan tersebut terlihat bahwa penurunan pinjaman luar negeri Indonesia relatif lebih lambat dibanding Thailand.

Jika dilihat dari rasio pinjaman - baik pinjaman luar negeri maupun pinjaman dalam negeri - terhadap PDB, seperti terlihat dalam grafik 4 , tampak bahwa selama periode 2000 sampai dengan 2004 rasio pinjaman pemerintah pusat terhadap PDB Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan Thailand. Hal ini dimungkinkan menjadi salah satu faktor penyebab relatif lambatnya pemulihan ekonomi Indonesia dibanding Thailand.

PENUTUP

Selama periode setelah krisis, yaitu 1998 sampai dengan 2005, pinjaman luar negeri pemerintah mempunyai kecenderungan peningkatan di bagian pinjaman komersial. Hal ini patut diwaspadai karena pinjaman komersial memiliki tingkat bunga yang lebih tinggi dibandingkan pinjaman ODA dan non-ODA. Untuk pinjaman luar negeri swasta, ada kecenderungan peningkatan FDI *(Foreign Direct Investment)* disertai dengan peningkatan pinjaman luar negeri swasta asing. Hal ini terjadi karena sebagian investasi asing juga dibiayai melalui pinjaman. Pinjaman luar negeri pemerintah dan swasta memiliki implikasi terhadap devisa. Makin tinggi pinjaman luar negeri makin banyak devisa yang diperlukan untuk membayarnya. Devisa inilah yang diperoleh dari ekspor. Dengan demikian ekspor harus senantiasa ditingkatkan.

Dibandingkan dengan negara berkembang lain di Asia, DSR Indonesia jauh lebih tinggi. Hal yang sama juga dapat dilihat dari rasio total pinjaman luar negeri terhadap ekspor barang dan jasa. Dibandingkan dengan Thailand, salah satu negara Asia yang sama-sama terkena krisis, tampak bahwa Indonesia lebih lambat pulih. Hal ini salah satu penyebabnya adalah karena lebih beratnya pinjaman Indonesia dibandingkan Thailand, seperti tercermin dari rasio total pinjaman pemerintah pusat terhadap PDB. Penarikan pinjaman luar negeri pemerintah cenderung menurun, bahkan juga terlihat

bahwa pembayaran cicilan pokok lebih besar dibandingkan penarikan pinjaman luar negeri, sementara masih ada penjadwalan ulang melalui Paris Club. Oleh karena perlu diambil kebijakan penjadwalan ulang yang tidak hanya melalui Paris Club karena forum Paris Club hanya untuk pinjaman bilateral, sementara itu, pemerintah masih memiliki pinjaman komersial, ODA-multilateral, dan non-ODA.

DAFTAR PUSTAKA

Alam, A. dan Sundberg, M., 2002, *A Decade of Fiscal Transition*, Policy Research Working Paper, World Bank, No. 2835.

Anaruo, E. dan Ramchander, S., 1998, "Current Account and Fiscal Deficit: Evidence from five Developing Economies of Asia", *Journal of Asian Economics*, Vol. 9: 487 - 501.

Bank Indonesia, *Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia*, beberapa edisi.

Bank Indonesia, *Laporan Perekonomian Indonesia*, Jakarta, beberapa edisi.

Edwards, S., 1995, *Why are Saving Rates So Different Across Countries? An International Comparative Analysis*, National Bureau of Economic Research Working Paper, No. 2875.

Fry, M., 1996, "How Foreign Direct Investment in Pacific Asia Improves The Current Account", *Journal of Asian Economics*, Vol 7: 117 - 130.

Ibrahim, S. B. dan Kumah, F.Y., 1996, "Comovements in Budget Deficits, Money, Interest Rate, Exchange Rate and Current Account Balance: Some Empirical Evidence", *Applied Economics*, Vol. 28: 117 - 130.

Kearney, C., dan Monadjemi, M.,1990, "Fiscal Policy and Current Account Performance: International Evidence on The Twin Deficits", *Journal of Macroeconomics*, Vol. 12: 197-219.

Leachman, L.L., dan Francis, B., 2002, "Twin Deficits: Apparition or Reality?", *Applied Economics*, Vol. 34: 1121 - 1132.

The International Centre for The Study of East Asian Development, 2004, *East Asian Economic Perspectives: Recent Trends and Prospects for Major Asian Economies*, Februari Vol. 15, No. 1, Kitakyushu, Jepang.

Todaro, Michael P.,2000, *Economic Development*, Seventh Edition, Addison Wesley Longman.

Tabel 1: Perkembangan Transaksi Finansial Neraca Pembayaran Indonesia 1998 - 2005 (juta US dollar)

Transaki Finansial	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
diantaranya: Investasi Asing Langsung di Indonesia	-241	-1,866	-4,550	-2,977	145	-597	1,023	2,258
- Saham	2,211	1,991	892	988	2,560	1,483	1,265	4,319
- Lainnya:	-2,452	-3,856	-5,442	-3,966	-2,415	-2,080	-242	-2,061
a.l. Pinjaman								
- Penarikan	4,891	2,591	2,081	1,606	2,603	1,681	2.595	2,603
- Pembayaran	-7,342	-6,447	-7,523	-5,572	-5,018	-3,761	-2,837	-4,664

Tabel 2: PPerkembangan Total Pinjaman Luar Negeri Indonesia dan Thailand 1997 - 2004 (juta US dollar)

Total Pinjaman Luar Negeri	1997	1998	2002	2003	2004
I. Indonesia	136,161	151,236	131,755	134,389	136,000
1. Pinjaman Jangka Panjang Pemerintah	55,857	67,305	70,058	73,412	-
2. Pinjaman Jangka Panjang Swasta	44,469	54,728	30,026	27,793	-
3. Pinjaman Jangka Pendek	32,865	20,113	22,809	22,809	-
4. Pinjaman IMF	2,970	9,090	8,862	10,276	-
II. Thailand	109,276	105,062	59,459	51,783	51,312
1. Pinjaman Jangka Panjang Pemerintah	16,905	20,224	18,016	16,574	15,642
2. Pinjaman Jangka Panjang Swasta	46,920	45,213	24,622	24,305	24,496
3. Pinjaman Jangka Pendek	38,294	28,421	11,919	10,904	12,714
4. Pinjaman IMF	2,492	3,239	389	-	

Sumber: Bank Indonesia, beberapa edisi

Tabel 3: Perkembangan Posisi Pinjaman Luar Negeri Terinci Menurut Pemerintah dan Swasta, Des 1998 - Desember 2005 (Juta US Dollar)

	Des 1998	Des 2001	Des 2004	Des 2005
A. Pinjaman Pemerintah	67,329	71,377	82,725	79,558
I. Komersial	2,388	4,301	5,324	9,542
II. ODA	48,422	51,749	59,244	53,978
1. Bilateral	22,374	22,718	30,339	27,525
a.l. a. Jepang	15,775	16,269	22,061	19,955
b. Amerika Serikat	1,445	1,547	1,521	1,553
c. Perancis	1,656	1,142	1,698	1,481
d. Jerman	1,099	911	1,425	1,333
e. Austria	273	798	1,049	871
f. Belanda	787	667	969	873
2. Multilateral	26,048	29,029	28,905	26,451
a.l. a. IMF	9,082	9,105	9,654	7,806
b. IDA & IBRD	10,931	12,303	9,892	9,149
- IDA	702	726	949	985
c. ADB	5,694	7,179	8,869	9,045
III. Non ODA	16,519	16,327	18,427	16,038
B. Pinjaman Swasta	83,557	61,696	54,299	53,923
I. Bank	10,810	6,649	3,909	4,849
1. Bank Persero	4,744	3,695	2,358	2,643
2. Bank Swasta Nasional	1,894	2,268	812	591
3. Bank Campuran	3,640	656	702	1,221
4. Bank Asing	532	30	38	393
II. Bukan Bank	72,747	55,047	50,389	49,074
1. LKBB	2,067	1,064	4,306	2,137
2. Bukan Lembaga Keuangan	70,680	53,983	46,084	46,937
Menurut Status Perusahaan				
1. BUMN	4,153	4,869	5,051	3,483
2. Swasta Nasional	36,161	22,882	17,906	24,560
3. Swasta Asing	32,433	27,296	27,432	21,032
C. Total A+B	150,886	133,073	137,024	133,481
Memorandum				

Sumber: Bank Indonesia, beberapa edisi

Tabel 4: Perkembangan Pembayaran Pokok dan Bunga Pinjaman Luar Negeri 1997 - 2005 (Dalam Juta US $)

	Pemerintah			Swasta					
				Bank			LKBB		
	Pokok	Bunga	Total	Pokok	Bunga	Total	Pokok	Bunga	Total
1999	2,580	3,220	5,800	4,198	1,114	5,312	1,897	219	2,116
2000	1,769	3,543	5,312	3,230	521	3,751	956	99	1,055
2001	3,619	3,429	7,048	3,709	414	4,123	561	59	620
2002	5,008	2,366	7,374	4,371	453	4,824	951	33	984
2003	4,000	2,450	6,450	4,965	113	5,078	556	23	579
2004	6,197	2,835	9,032	6,146	119	6,265	568	34	602
2005	5,448	1,787	7,235	4,582	51	4,633	824	55	879
1999 - 2005	28,621	19,630	48,251	31,201	2,785	33,986	6,313	522	6,835

	Bukan Lembaga Keuangan			Total Swasta	
	Pokok	Bunga	Total	Pokok	Pokok dan
1999	18,682	4,821	23,503	24,777	
2000	15,140	3,912	19,052	19,326	
2001	8,321	11,594	10,815	12,591	
2002	6,616	1,184	7,800	11,938	
2003	6,148	645	6,793	11,669	
2004	5,886	646	6,532	12,600	
2005	3,835	625	4,460	9,241	
1999 - 2005	64,628	23,427	78,955	102,142	

Sumber: Bank Indonesia, beberapa edisi

Tabel 5: Perkembangan Penarikan dan Pembayaran Pinjaman Luar Negeri Pemerintah (juta US $)

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	1999 - 20
1. Pinjaman (A+B)	3,980	2,094	661	469	-383	-2,675	-315	3,
A. Penarikan Pinjaman	6,559	3,863	2,481	2,300	1,837	2,519	2,598	22
Bantuan Program	4,143	1,436	507	773	210	550	1,250	8
Bantuan Proyek	2,416	2,426	1,975	1,527	1,627	1,969	1,349	13
CGI	2,408	2,420	1,963	1,503	1,625	1,375	1,132	12
ODA	1,682	2,193	1,521	1,231	1,412	1,375	1,132	10
Bilateral	659	673	549	491	490	509	778	4
Multilateral	1,023	1,520	972	740	922	866	355	6
Non-ODA	726	227	442	272	212	0	0	1
Non-CGI	8	7	12	23	2	594	216	
B. Pembayaran Pinjaman	-2,579	-1,769	-1,821	-1,830	-2,220	-5,194	-2,913	-18
Amortisasi	-4,069	-4,272	-4,679	-5,467	-5,273	-5,194	-5,581	-34
Penjadwalan kembali	1,490	2,503	2,858	3,637	3,052	0	2,668	16
- Pokok	1,490	2,503	2,858	2,892	2,644	0	1,769	14
- Bunga	0	0	0	745	409	0	899	
2. Surat Berharga	0	0	0	0	0	920	2,095	
Memorandum:								
IMF:	1,373	1,123	-1,375	-1,006	603	-983	-1,106	
Penarikan	1,373	1,123	397	1,415	1,959	0	0	
Pembayaran	0	0	-1,772	-2,421	-1,356	-983	-1,106	

Sumber: Bank Indonesia, beberapa edisi

Tabel 6: Perkembangan Posisi Pinjaman Luar Negeri Swasta Bukan Bank, Terinci Menurut Sektor Ekonomi, Des 1998 - Desember 2005 (Juta US $)

Sektor	Des 1998	Des 2001	Des 2004	Des 2005
1. Industri Pengolahan	30,517	28,684	24,147	18,693
2. Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	8,490	4,299	3,407	4,897
3. Perdagangan, Hotel, Restoran	3,188	2,401	1,677	945
4. Pengangkutan & Komunikasi	3,633	2,952	528	1,201
5. Pertambangan & Penggalian	4,320	4,401	5,285	4,768
6. Bangunan	2,696	2,278	1,935	346
7. Listrik, Gas, dan Air Bersih	3,845	4,142	4,641	4,268
8. Pertanian, Peternakan, Kehutanan, & Perikanan	2,026	1,709	1,525	3,663
9. Jasa2	1,243	552	3,024	3,481
10. Lainnya	12,799	3,630	4,217	6,812
Total	72,747	55,047	50,390	49,074

Sumber: Bank Indonesia, beberapa edisi

Tabel 7: Posisi Pinjaman Luar Negeri Pemerintah Menurut Mata Uang Utama (Juta US $), 1998 - 2005

Akhir Periode	DEM	EUR	FRF	GBP	JPY	SDR	USD	Lainnya	Jumlah
1998	3,104	-	2,046	1,048	22,251	9,187	25,342	4,351	67,329
2001	-	7,027	-	1,158	22,162	9,283	30,939	809	71,378
2004	-	10,851	-	1,444	31,312	9,758	28,217	1,143	82,725
2005	-	9,425	-	1,237	24,738	7,965	3,411	2,147	79,659

Sumber: Bank Indonesia, beberapa edisi

Tabel 8: Perkembangan Posisi Pinjaman Luar Negeri Swasta Bukan Bank, Terinci Menurut Sektor Ekonomi, Des 1998 - Desember 2005 (Juta US $)

	Des 1998	Des 2001	Des 2004	Des 2005
1. Industri Pengolahan	30,517	28,684	24,147	18,693
2. Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	8,490	4,299	3,407	4,897
3. Perdagangan, Hotel, Restoran	3,188	2,401	1,677	945
4. Pengangkutan & Komunikasi	3,633	2,952	528	1,201
5. Pertambangan & Penggalian	4,320	4,401	5,285	4,768
6. Bangunan	2,696	2,278	1,935	346
7. Listrik, Gas, dan Air Bersih	3,845	4,142	4,641	4,268
8. Pertanian, Peternakan, Kehutanan, & Perikanan	2,026	1,709	1,525	3,663
9. Jasa2	1,243	552	3,024	3,481
10. Lainnya	12,799	3,630	4,217	6,812
Total	72,747	55,047	50,390	49,074

Sumber: Bank Indonesia, beberapa edisi